

**EDISI 03
DESEMBER
2025**

TIM KONTEN MPP PKS

**PKS**

Salam Redaksi

Indonesia lahir dari amanah sejarah yang besar: doa para ulama, pengorbanan para pahlawan, serta harapan rakyat kecil akan hidup yang bermartabat. Di titik inilah keadilan menemukan maknanya yang paling hakiki—bukan sekadar slogan politik, melainkan perintah ilahi dan janji konstitusi yang harus terus diperjuangkan.

Islam menempatkan keadilan sebagai syarat tegaknya masyarakat, sementara Pancasila menjadikannya dasar kehidupan berbangsa. Keduanya bertemu dan saling menguatkan dalam satu jalan: menghadirkan kesejahteraan yang berakar pada moral, keberpihakan, dan kemanusiaan.

Edisi ini mengajak pembaca menapaki Jalan Keadilan sebagai proyek peradaban: melawan kezaliman, menolak oligarki, serta meneguhkan peran kader sebagai mukmin, patriot, dan pejuang rakyat. Kami percaya, Indonesia yang adil adalah Indonesia yang diberkahi—bangsa yang kuat bukan hanya karena sumber dayanya, tetapi karena keberanian menegakkan kebenaran.

Selamat membaca.



MPP PKS

eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsep Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



Jalan Keadilan Menuju Kesejahteraan

MPP PKS

Keadilan: Amanah Allah, Jiwa Indonesia

Indonesia bukan sekadar sebuah negara dalam pengertian administratif atau geografis. Ia adalah amanah sejarah yang lahir dari proses panjang, berdiri di atas doa para ulama yang tak pernah lelah memohonkan keselamatan bagi negeri ini, di atas darah para pahlawan yang rela mengorbankan nyawa demi kemerdekaan, di atas air mata rakyat kecil yang memikul beban penjajahan, serta di atas janji kemerdekaan untuk memuliakan martabat manusia. Semua unsur itu menyatu membentuk fondasi moral bangsa.



Kemerdekaan Indonesia adalah ni'mat dari Allah SWT sekaligus tanggung jawab kebangsaan yang tidak ringan.

Ia bukan hadiah tanpa konsekuensi, melainkan amanah yang menuntut pemeliharaan terus-menerus.

Karena itu, perjuangan menegakkan keadilan tidak dapat dipandang semata sebagai agenda politik atau sosial, melainkan sebagai ibadah bagi umat, sebagai bakti bagi bangsa, dan sebagai kelanjutan dari misi luhur para pendahulu yang telah mengorbankan segalanya demi lahirnya republik ini.

Tim Konten MPP PKS

Allah SWT secara tegas memerintahkan keadilan sebagai prinsip hidup bersama: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan..." (QS. An-Nahl: 90).

Perintah ilahi ini tidak berhenti sebagai nilai spiritual, tetapi diabadikan oleh bangsa Indonesia dalam sila kelima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dua perintah ini—yang satu turun dari langit, yang lain lahir dari kesadaran kebangsaan—bertemu dalam satu kata kunci yang sama: keadilan.

Di titik inilah Gerakan Keadilan berdiri, sebagai ikhtiar untuk memastikan amanah tersebut terus hidup dan terjaga dalam denyut kehidupan bangsa.



Keadilan dalam Islam dan Jati Diri Bangsa

Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan syarat mutlak tegaknya masyarakat yang sehat dan bermartabat. Tanpa keadilan, kehidupan sosial akan runtuh oleh kezaliman dan ketimpangan. Sejalan dengan itu, nasionalisme Indonesia sejak awal menempatkan keadilan sebagai pilar utama pembangunan negara.

Keduanya bertemu dalam satu visi yang sama, meski lahir dari bahasa dan konteks yang berbeda.

Sejak awal berdirinya, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang bertuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memelihara persatuan, mengedepankan musyawarah, dan bertekad mewujudkan keadilan sosial.

Lima prinsip ini terangkum dalam Pancasila, yang jika ditelusuri akarnya, seluruhnya selaras dengan nilai-nilai Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin.

Islam memberi ruh dan arah moral, sementara Pancasila memberi struktur dan kerangka kebangsaan. Keduanya tidak saling meniadakan, justru berpadu dan saling menguatkan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.



Melanjutkan Perjuangan Para Pendiri Bangsa

Sejarah Indonesia mencatat bahwa para pendiri bangsa bukanlah sosok-sosok yang memisahkan agama dari nasionalisme. Mereka justru menampilkan teladan nasionalisme religius yang kokoh dan berakar.

KH. Hasyim Asy'ari membangkitkan semangat jihad untuk mempertahankan tanah air sebagai kewajiban keagamaan.

Bung Hatta membangun gagasan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada prinsip keadilan sosial.

Agus Salim memadukan diplomasi internasional dengan kedalaman iman dan kebijakan negara.

Buya Hamka dengan tegas menolak pemisahan antara agama dan kebangsaan, sementara Syafruddin Prawiranegara rela memimpin negara dalam situasi paling kritis demi menjaga amanah republik.

Dari mereka semua, bangsa ini belajar satu pelajaran mendasar: negara tidak akan berdiri kokoh jika keadilan di bumi ini tidak ditegakkan.

Gerakan Keadilan memandang dirinya sebagai bagian dari mata rantai panjang perjuangan tersebut, sebuah perjuangan moral yang menyatukan ulama, pahlawan, dan rakyat kecil dalam satu ikhtiar besar menjaga martabat bangsa.

Musuh Keadilan adalah Musuh Negara

Dalam perspektif Islam maupun nasionalisme Indonesia, kezaliman bukan sekadar pelanggaran moral individual, melainkan ancaman serius bagi kelangsungan negara.

Sejarah menunjukkan bahwa sebuah negeri lebih sering runtuh bukan karena serangan musuh dari luar, melainkan karena kerusakan dari dalam.



Ketika pejabat terjerumus dalam korupsi, ketika kekuasaan kehilangan keberpihakannya, ketika elit ekonomi menumpuk kekayaan dengan serakah, ketika hukum dapat dibeli, dan ketika kebijakan publik justru merampas hak rakyat, saat itulah fondasi negara mulai rapuh.

Al-Qur'an telah mengingatkan dengan tegas bahwa kehancuran sebuah negeri sering kali bermula dari kezaliman penduduknya.

Sejarah Indonesia pun menjadi saksi bahwa korupsi meruntuhkan kepercayaan publik, oligarki mencengkeram ekonomi rakyat, politik uang merusak demokrasi, dan ketimpangan sosial memicu perpecahan.

Oleh karena itu, melawan kezaliman bukan hanya pilihan moral, tetapi tugas kebangsaan sekaligus kewajiban iman.

Oligarki: Penjajahan Baru yang Mengancam Indonesia

Jika pada masa lalu penjajahan datang dengan kapal dan senapan, maka di era modern penjajahan hadir dalam bentuk yang lebih halus namun tak kalah berbahaya.

Kartel ekonomi, mafia sumber daya alam, dinasti politik, investor yang mendikte regulasi, serta intervensi kekuatan asing terhadap kebijakan

strategis merupakan wajah baru dari neo-kolonialisme. Ia bekerja tanpa bendera dan tanpa deklarasi perang, tetapi dampaknya nyata terhadap kedaulatan bangsa.

Dalam pandangan Islam, kekuasaan mutlak yang dimonopoli manusia disebut taghut. Dalam perspektif kebangsaan, dominasi segelintir elit atas politik dan ekonomi adalah pengkhianatan terhadap rakyat.

Gerakan Keadilan menolak seluruh bentuk penjajahan baru ini. Tujuannya jelas: menghadirkan Indonesia yang benar-benar merdeka, bukan hanya secara politik, tetapi juga bersih secara moral dan diridhai oleh Allah SWT.



Tim Konten MPP PKS

Keadilan sebagai Jalan Membangun Peradaban Indonesia

Bangsa besar tidak dibangun semata-mata oleh kekayaan alam atau kekuatan militer, melainkan oleh akhlak sosial dan keadilan negara.

Dalam Islam, keadilan adalah rahmat bagi seluruh makhluk. Dalam konteks Indonesia, keadilan adalah syarat utama terjaganya persatuan nasional.

Dari kesadaran inilah Gerakan Keadilan merumuskan fondasi peradaban bangsa ke depan.

Keadilan sosial menempatkan rakyat kecil sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar objek pembangunan.

Keadilan ekonomi memastikan bahwa kekayaan nasional tidak dikuasai oleh segelintir orang atau pihak asing.

Keadilan politik menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga kekuasaan harus dijalankan secara netral, bersih, dan jujur.

Sementara keadilan hukum menuntut agar hukum berdiri tegak, tidak tunduk pada uang maupun tekanan kekuasaan.

Inilah proyek besar membangun negara yang kuat, sejahtera, dan bermartabat.

Kader sebagai Mukmin, Patriot, dan Pejuang

Kader Gerakan Keadilan dibentuk dengan tiga identitas yang harus berjalan seimbang. Ia adalah mukmin yang tunduk kepada Allah, dengan ibadah yang kokoh, akhlak yang terjaga, dan hati yang bersih.

Ia juga seorang patriot yang mencintai bangsa, bangga sebagai Indonesia, memelihara persatuan, dan menolak segala bentuk perpecahan.

Di saat yang sama, ia adalah pejuang yang berani membela rakyat, menghadapi penguasa zalim tanpa takut kehilangan jabatan, serta selalu berdiri bersama mereka yang lemah.

Dengan identitas tersebut, kader tidak berhenti sebagai warga negara biasa. Ia dituntut menjadi imam dalam akhlak, pemimpin dalam kerja sosial, dan teladan dalam moral publik.

Dalam makna yang lebih luas, ia adalah penjaga negeri.



Jalan Panjang Perubahan: Dakwah, Politik, dan Kebangsaan

Gerakan Keadilan memahami bahwa perubahan tidak bisa ditempuh dengan satu jalur tunggal. Karena itu, perjuangan dijalankan melalui dakwah kesadaran yang mendidik rakyat agar memahami hak-haknya dan tidak tunduk pada elite zalim. Perjuangan juga dilakukan melalui strategi politik yang sah, dengan mendorong perubahan kebijakan, kerja parlemen, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Semua itu berpadu dalam agenda kebangsaan untuk membangun ekonomi rakyat, memperkuat kedaulatan negara, dan menjaga Indonesia dari intervensi kekuatan luar.

Perjuangan ini tidak dibatasi oleh siklus lima tahunan pemilu, melainkan diarahkan untuk membangun Indonesia yang berkeadilan hingga seratus tahun ke depan.

Penutup – Indonesia Adil adalah Indonesia yang Diberkahi

Allah SWT berfirman, "Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami bukakan bagi mereka berkah dari langit dan bumi." (QS. Al-A'raf: 96).

Ayat ini menegaskan bahwa keberkahan tidak akan hadir di negeri yang zalim, melainkan di negeri yang menegaskan keadilan.

Gerakan Keadilan meyakini bahwa Indonesia adalah bangsa besar, umat Islam adalah kekuatan moralnya, Pancasila adalah landasannya, keadilan adalah jalannya, dan keridhaan Allah adalah tujuan akhirnya.

Karena itu, perjuangan ini bukan sekadar untuk menang di dunia, melainkan agar negeri ini menang di mata Allah Rabbal 'Alamin.

Resume dari "Falsafah Dasar Perjuangan: Jalan Keadilan Menuju Kesejahteraan", PKS, Jakarta, 2008.



Ideologi Keadilan

Majelis Pertimbangan Pusat PKS

Keadilan: Amanah Langit, Jiwa Indonesia

KEADILAN

★ Nilai Islam

🦶 Nilai Pancasila

Inti Keadilan:

Titik Temu Islam & Pancasila

- Perintah berlaku adil
- Ajakan berbuat ihsan
- Rahmat bagi seluruh manusia

- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
- Landasan moral negara
- Peneguhan kemanusiaan & persatuan

Jejak

Para Penjaga Keadilan
(Tokoh Nasional)



Musuh Keadilan

- Korupsi, politik memihak elit,
- kartel & monopoli ekonomi,
- hukum yang dapat dibeli,
- kebijakan merugikan rakyat

Kezaliman
meruntuhkan
bangsa dari dalam



Oligarki

Penjajahan Baru
Tanpa Bendera



Empat Pilar Peradaban Adil

Pilar 1 Keadilan Sosial

Rakyat kecil
sebagai pusat
kebijakan

Pilar 2 Keadilan Ekonomi

Kekayaan nasional
untuk semua, bukan
segelintir elit.

Pilar 3 Keadilan Politik

Kekuasaan
bersih, netral,
dan jujur.

Pilar 4 Keadilan Hukum

Hukum tidak
tunduk pada uang
dan tekanan

Penjajahan Modern:
Mafia sumber daya alam
Kartel ekonomi
Dinasti politik
Investor penekan
kebijakan
Intervensi asing

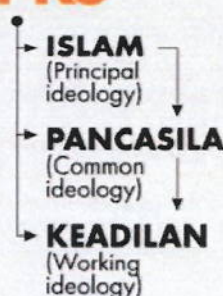
Identitas Kader PKS

Mukmin – Patriot
– Pejuang Mukmin

- Akhlak kuat, integritas bersih, hati terjaga.
- Patriot
- Menjaga persatuan, mencintai Indonesia, menolak perpecahan.
- Pejuang
- Berpihak pada rakyat kecil, berani menghadapi kezaliman

Karakter kader menentukan kualitas perjuangan PKS

Ideologi PKS



Jalan Perubahan PKS untuk Indonesia

- Dakwah Kesadaran:
- Mendidik rakyat memahami hak-haknya
- Strategi Politik: Perjuangan kebijakan berkeadilan
- Agenda Kebangsaan: Memperkuat kedaulatan & membela ekonomi rakyat

Visi: Indonesia Madani yang Adil,
Sejahtera dan Bermartabat

Keadilan adalah nafas republik—tanpanya Indonesia kehilangan makna."

eBuletin IDEOLOGI MPP PKS

Menerima saran dan kontribusi tulisan yang berkaitan dengan Kebijakan Dasar Partai (KDP) yang inspiratif dan edukatif. Layangkan saran Anda melalui **WA +62 812-1036-7136**